

**TINJAUAN YURIDIS PERBEDAAN PENAFSIRAN PASAL 2
AYAT (5) UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU ATAS PERMOHONAN KEPAILITAN
DAN PKPU TERHADAP BUMN (STUDI KASUS PT. MERPATI
NUSANTARA AIRLINES)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**FARITZ PUTRA PANGERAN
NIM. 145010107111160**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PERBEDAAN PENAFSIRAN PASAL 2 AYAT (5) UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DALAM PUTUSAN PERMOHONAN PAILIT DAN PKPU TERHADAP BUMN (STUDI KASUS PT. MERPATINUSANTARA AIRLINES)

Faritz Putra Pangeran
NIM :145010107111160

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M
NIP. 197206222005011002

Ranitya Ganindha, S.H., M.H.
NIP. 198806302014042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Perdata Bisnis

Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M
NIP. 197206222005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 10 November 2018
Yang menyatakan,

Faritz Putra Pangeran
NIM. 145010107111160



KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti ucapkan pada kehadiran ALLAH S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Tidak lupa pula junjungan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menunjukan jala kebenaran dan menjadi suri tauladan bagi peneliti.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, Peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,LL.M. dan Ibu Ranitya Ganindha, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing saya dalam menyusun Tugas Akhir ini
3. Kedua orang tua peneliti, Bapak Zulkifli Ibrahim dan ibu Merri Yantina Zen serta saudara peneliti, Aditya Oktaviandri dan Heykal Parmato yang telah berperan besar dalam perkuliahan peneliti berupa hal – hal materiil ataupun imateriil
4. Sahabat seperjuangan peneliti selama di perkuliahan, Sarah, Mia, Aduy, Julio, Justin, Devani, Yuke, Vanya, Nasya, Fidya, Dino, Oseng, Putsep, Dimas, Vidi, Desdos, Kalip, Kakel, Katuy, Kakte, Jefri, Joel, Gustaf, Tito, Timo, Vannia, Claudia dan seluruh teman – teman dekat peneliti yang telah terlibat dalam kehidupan peneliti selama dikampus.
5. Keluarga besar Fakultas Hukum 2014, Keluarga besar ALSA LC UB , Keluarga besar BMCC, Keluarga besar Dinoyo dan Keluarga besar Tim Mutiara Djokosoetono IX yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran dalam bidang akademik dan non akademik sehingga memberikan perkembangan positif dalam diri peneliti.

Peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti mengharapkan masukan dan kritik yang mendukung untuk memperbaiki skripsi ini.

Malang, 10 November 2018

Faritz Putra Pangeran

RINGKASAN

Faritz Putra Pangeran, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oktober 2018, TINJAUAN YURIDIS PERBEDAAN PENAFSIRAN PASAL 2 AYAT (5) UNDANG – UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DALAM PUTUSAN PERMOHONAN PAILIT DAN PKPU TERHADAP BUMN (STUDI KASUS PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES), Dr. Budi Santoso, S.H.,LL.M. dan Ranitya Ganindha, S.H.,M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inkonsistensi Putusan hakim antara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU pada perkara permohonan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa PT. Merpati Nusantara hanya dapat dimohonkan PKPU oleh Kementerian keuangan. Sedangkan Majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat bahwa Permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara dapat diajukan oleh kreditornya.

Penelitian ini membahas Mengapa hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Surabaya memberikan dasar pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan hakim dikarenakan adanya perbedaan pendapat hakim dalam memaknai Badan Usaha Milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya. Dalam hal ini Pengadilan Niaga Surabaya menerapkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya sedangkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tanpa memperhatikan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

SUMMARY

Faritz Putra Pangeran, Bussiness Law, Law Faculty of Brawijaya University. October 2018, JUDICIAL REVIEW OF DIFFERENCE INTERPRETATION ARTICLE 2 PARAGAPH (5) OF THE BANKCRUPTCY AND PKPU LAW ON CASES OF BANKCRUPTCY AND PKPU TO A STATE-OWNED ENTERPRISE (ON CASES PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES), Dr. Budi Santoso, S.H.,LL.M. and Ranitya Ganindha, S.H.,M.H.

This study aims to analyze the Inconsistency of Judges' Decisions between the Central Jakarta Commercial Court and the Surabaya Commercial Court in the application of Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and *PKPU* Law on cases of *PKPU*'s application to PT. Merpati Nusantara Airlines as a State-Owned Enterprise. The Central Jakarta Commercial Court panel of judges argued that PT. Merpati Nusantara can only be requested to *PKPU* by the Ministry of Finance. While the Surabaya Commercial Court judges argued that the *PKPU* to PT. Merpati Nusantara can be submitted by its creditors.

This study discusses why the judges of the Central Jakarta Commercial Court and the Surabaya Commercial Court have a different arguments in making a verdict on the case of the *PKPU* petition against PT. Merpati Nusantara Airlines. This research was conducted with a Juridical-Normative method with a statute approach and conceptual approach.

The results of this study indicate that the inconsistency of the judge's decision was due to opinion differences of the judges in interpreting the definition of State-Owned Enterprises engaged in the public interest in Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and *PKPU* Laws along with their explanations. In this case, the Surabaya Commercial Court applies Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and *PKPU* Laws along with their explanations, while the Central Jakarta Commercial Court applies Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and *PKPU* Law without regard to the explanation of Article 2 Paragraph (5) of Bankruptcy and *PKPU* Laws.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan	13
1. Pengertian Kepailitan.....	13
2. Syarat – Syarat Kepailitan	16
3. Pihak yang dapat mengajukan Kepailitan.....	17
4. Asas – asas Kepailitan	21
B. Tinjauan Umum tentang PKPU	22
1. Pengertian PKPU	22
2. Syarat Pengajuan Permohonan PKPU	25
3. Akibat Hukum PKPU	28
C. Tinjauan Umum BUMN	30
1. Pengertian BUMN.....	30
2. Bentuk – bentuk BUMN.....	30
2.1. Perusahaan Umum.....	32
2.2. Perusahaan Persero	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Jenis Bahan Hukum	37
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	38
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
F. Definisi Konseptual	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines	42
--	----

1. Kasus Posisi Putusan PKPU Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	42
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan perkara PKPU Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	46
3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan perkara PKPU Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	48
 B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam Putusan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines.....	57
1. Kasus Posisi Putusan PKPU Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby.....	57
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan perkara PKPU Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby.....	60
3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan perkara PKPU Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby.....	64
 C. Analisis Inkonsistensi hakim dalam Penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dalam Putusan perkara PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines.....	70
1. Analisis Hak mengajukan Permohonan Pailit atau PKPU berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.....	70
2. Analisis Inkonsistensi hakim dalam Penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU terhadap Permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara Airlines	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 4.1 Sinkronisasi Pengertian BUMN dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perserikatan perserangan”

Tindakan Pailit adalah suatu sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Tujuan dari kepailitan tersebut adalah sebagai upaya terakhir dalam melakukan pembayaran utang bagi debitor yang sudah tidak mampu melakukan pembayaran. Akibat dari kepailitan tersebut menyebabkan dicabutnya kewenangan debitor dalam menjalankan usahanya dan dilakukannya pemberesan terhadap harta dari debitor tersebut. Sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang – Undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak debitor dan kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara – cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu

untuk merestrukturisasi utangnya.¹ Apabila kepailitan adalah upaya terakhir dalam pembayaran utang dengan cara sita umum berbeda hal dengan halnya PKPU, PKPU adalah upaya perdamaian atau penyelamatan usaha yang dilakukan antara debitor dan kreditor dengan pembayaran utang yang bermasalah dengan cara merestrukturisasi kembali perjanjian dan memberikan kelonggaran waktu bagi debitor dalam melakukan pembayaran utang.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) menjelaskan kepailitan ditujukan bagi kreditor yang memiliki dua atau lebih kreditor yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal tersebut merupakan suatu kondisi yang disyaratkan oleh Undang – Undang Kepailitan dan PKPU untuk dapat ditujukannya permohonan pailit oleh kreditor. Dalam hal ini yang dimaksudkan kreditor adalah baik kreditor konkruen, preferen, maupun separatis. Namun apabila permohonan pailit diajukan terhadap suatu pihak tertentu sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Ayat (2),(3), (4), (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU maka ketentuan mengenai pengajuan permohonannya diatur lebih lanjut. Dalam Pasal 2 ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa apabila debitor yang diajukan pailit adalah perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, ataubadan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh kementerian keuangan.

Mengenai Kepailitan terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang

¹ Munir Fuady, **Hukum pailit dalam teori dan praktek**, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.175.

Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan Pailit suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah menteri keuangan, yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik menurut Pejelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa menteri keuangan adalah satu – satunya pihak yang dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Sedangkan hal berbeda dengan pengertian BUMN yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara dijelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang beraal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Definisi kekayaan Negara yang dipisahkan menurut Pasal 1 angka 10 UU BUMN adalah yang pada intinya penyertaan modal Negara yang dalam Persero dan/atau perum maupun Perseroan terbatas lainnya berasal dari APBN yang merupakan bagian dari kekayaan Negara.²Pada prinsipnya salah satu tujuan dari didirikannya mengejar keuntungan bagi negara dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bermutu tinggi dan memadai bagi masyarakat.Dan didalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 diatur pula

² Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

bahwa BUMN terbagi menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Umum dan Perusahaan Persero.

BUMN yang berbentuk perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa dengan kualitas tinggi dan mengejar keuntungan. Sedangkan BUMN yang berbentuk perusahaan persero adalah BUMN yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuannya untuk mengejar keuntungan. Dan perusahaan persero identik dengan perseroan terbatas karena hal tersebut menurut Pasal 11 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 maka prinsip – prinsip yang berlaku adalah yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk dalam hal Kepailitan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh BUMN bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Apabila dicermati kembali hal tersebut menimbulkan perbedaan terhadap pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dalam hal pemberian kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN. Hal tersebut dikarenakan Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur lebih lanjut apabila debitor adalah BUMN yang bukan bergerak di kepentingan publik.

Hal tersebut menyebabkan ketidaksepahaman hakim dalam memaknai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik dalam

memutus perkara Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN, apabila yang menjadi termohon seperti PT. Merpati Nusantara Airlines yang mana PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang kepemilikan sahamnya 96,99% dimiliki oleh negara dan 3,01% sahamnya dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Pada Tahun 2016 PT. Prathita Titian Nusantara selaku kreditor dari PT. Merpati Nusantara Airlines mengajukan permohonan PKPU pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dalam permohonan PKPU yang diajukan PT Merpati Nusantara Airlines memiliki utang sejumlah Rp.80.675.511.819,- dan USD 77,671.31,- belum terbayar yang menurut berita acara rekonsiliasi utang sudah harus dibayarkan pada tanggal 15 Februari 2016. Dan PT. Prathitan Titian Nusantara telah melampirkan pula kreditor lain dari PT. Merpati Nusantara Airlines yaitu PT. Bank Mandiri, PT. PPA, PT. Kirana Mitra Mandiri. Namun pada putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst permohonan PKPU tersebut ditolak dengan pertimbangan bahwa PT. Merpati Nusantara adalah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik karena berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines tujuan disebutkan tujuan serta kegiatan usaha dibidang jasa angkutan negara serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi bagi masyarakat, sehingga pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan adalah Kementerian Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2018 hal serupa juga terjadi pada PT. Merpati Nusantara Airlines yang mana salah satu kreditornya PT. Parewa Aero Katering mengajukan permohonan PKPU pada pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan utang sejumlah Rp.60.000.000.000 yang belum dibayarkan. Lalu pada putusan

Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Niaga.Sby permohonan tersebut dikabulkan karena PT. Merpati Nusantara Airlines tidak 100% sahamnya dimiliki oleh negara.

Berdasarkan penjabaran kasus tersebut pada praktiknya terdapat inkonsistensi putusan hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan terhadap perkara Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN. Maka dari muncul ide peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PERBEDAAN PENAFSIRAN PASAL 2 AYAT (5) UNDANG – UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU ATAS PERMOHONAN PAILIT ATAU PKPU TERHADAP BUMN (STUDI KASUS PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES)**

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

NO.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2009	Amiruddin, Universitas Sumatera Utara	Tinjauan Hukum Mengenai Permohonan Pailit Perusahaan	1 . Bagaimana Prosedur dan Syarat Permohonan Pailit BUMN 2. Bagaimana	1. Untuk Mengetahui Prosedur dan syarat permohonan pailit

			<p>BUMN</p> <p>Berdasarkan</p> <p>UU Nomor</p> <p>37 Tahun</p> <p>2004</p>	<p>Pertimbangan</p> <p>Hakim dalam</p> <p>Putusan Pailit</p> <p>Perusahaan</p> <p>BUMN</p> <p>Dirgantara</p> <p>Indoneisa</p> <p>3. Bagaimana</p> <p>Akibat hukum</p> <p>putusan pailit</p> <p>perusahaan</p> <p>BUMN</p>	<p>perusahaan</p> <p>BUMN</p> <p>2. Untuk</p> <p>Memahami</p> <p>pertimbangan</p> <p>hakim dalam</p> <p>putusan pailit</p> <p>PT.</p> <p>Dirgantara</p> <p>Indonesia</p> <p>3. untuk</p> <p>mengetahui</p> <p>akibat hukum</p> <p>putusan pailit</p> <p>perusahaan</p> <p>BUMN</p>
2	2011	<p>Josye A</p> <p>Barus,</p> <p>Universitas</p> <p>Indonesia</p> <p>(UI)</p>	<p>Tinjauan</p> <p>Hukum</p> <p>Permohonan</p> <p>Pailit Badan</p> <p>Usaha Milik</p> <p>Negara</p> <p>Berdasarkan</p> <p>Undang –</p>	<p>1. Bagaimana</p> <p>Kepailitan Pada</p> <p>Perusahaan</p> <p>BUMN Menurut</p> <p>UU No.37</p> <p>Tahun 2004</p> <p>tentang</p> <p>Kepailitan dan</p>	<p>Skripsi ini</p> <p>menjelaskan</p> <p>tentang</p> <p>bagaimana</p> <p>proses</p> <p>kepailitan</p> <p>pada BUMN</p> <p>dan pihak –</p>

			Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU	PKPU 2. Apakah pihak lain selain oleh Kementerian Keuangan dapat mengajukan Permohonan Pailit terhadap BUMN.	pihak yang berwenang dalam melakukan Permohonan Pailit kepada BUMN.
3	2016	Shinta Novi Wardhani, Universitas Jember (UJ)	Akibat Hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dinyatakan Pailit	1 . Apakah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dapat dipailitkan. 2. Apa Akibat Hukum Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang	1 . untuk mengetahui dan memahami pengaturan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. 2. untuk mengetahui akibat hukum

				dinyatakan Pailit	Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang dinyatakan pailit
--	--	--	--	-------------------	---

B. RUMUSAN MASALAH

Mengapa hakim memberikan dasar pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan PKPU antara Putusan Nomor 15/Pdt.Sus – PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus – PKPU/2018/PN.Niaga.Sby?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara Putusan Nomor 15/Pdt.Sus – PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus – PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum bisnis pada bidang Kepailitan dan PKPU serta dapat menjadi sudut pandang baru baik secara langsung maupun

tidak langsung dalam memberikan kepastian hukum dalam perkara Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum dalam hal ini adalah Hakim serta Advokat sebagai pelaksana hukum secara langsung dalam hukum Kepailitan dan PKPU, agar pada praktiknya lebih bijaksana dalam menegakan dan memahami syarat – syarat Kepailitan dan PKPU sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- b. Bagi masyarakat dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam perkara Kepailitan dan PKPU sebagai Kreditor maupun Debitor serta Pemohon dan Termohon, agar dalam praktiknya para pihak menjadi lebih memahami ruang lingkup hukum Kepailitan dan PKPU yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara berurutan, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi landasan dalam penulisan ini. Kemudian dijelaskan juga mengenai rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan, serta manfaat dari penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bagian bab kajian pustaka ini, penulis menjelaskan mengenai konsep umum yang perlu diketahui pembaca mengenai penelitian ini terkait teori yang berkaitan dengan penelitian dan bahan analisa yang akan digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian bab metode penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual dari penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab hasil dan pembahasan ini, penulis menjelaskan mengenai analisis terhadap Pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaitkan dengan peraturan perundang - undangan, serta diikuti dengan hasil analisis penulis untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk masyarakat serta seluruh pihak yang terkait dengan pembahasan pada skripsi ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Istilah Pailit pada dasarnya merupakan terjemahan dari beberapa bahasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof.Dr.Sunarmi, S.H.,M.H. dalam bukunya :

Istilah “pailit” dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin, dan Inggris. Dalam bahasa Perancis, istilah “*Faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Didalam bahasa Belanda dipergunakan istilah “*Faillite*” yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Sedangkan dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah “*to fail*”, dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah “*failure*”.³

³ Sunarmi, **Hukum Kepailitan : Edisi 2**, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 23

Apabila ditinjau dari khasanah ilmu pengetahuan hukum, arti dari pailit adalah seorang debitor yang berhenti membayar utang – utangnya. Hal tersebut tercermin pada Pasal 1 *Failisementverordening* yang menyebutkan

“Setiap pihak yang berutang (debitor) yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang – utangnya, dengan putusan Hakim, baik atas permintaan sendiri maupun atas seorang atau lebih pihak berutangnya (kreditor), dinyatakan pailit”.

Dari rumusan tersebut, diketahui agar seseorang dapat dikatakan pailit harus memenuhi beberapa keadaan atau syarat sebagai berikut:

- 1) Terdapat keadaan berhenti membayar, yakni bila seorang debitor sudah tidak mampu atau tidak mau lagi membayar utang – utangnya;
- 2) Harus terdapat lebih dari seorang kreditor, dan salah seorang dari mereka itu piutangnya sudah dapat ditagih.⁴

Selanjutnya, *Black's Law Dictionary* mengartikan pailit atau ‘*bankrupt*’ adalah sebagai berikut:⁵

“*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable pay its debt as they are, or become due*”. The term includes a person against

⁴*Ibid*, hlm. 27

⁵Andriani Nurdin, **Keapilittan BUMN Persero Berdasarkan Kepastian Hukum**, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 129

whom a voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a bankrupt.”⁶

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan Pailit atau bangkrut adalah suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagi secara adil diantara para kreditor ⁷

Adapun pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan pengertian Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁸

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pailit itu sendiri adalah keadaan beerhentinya pembayaran seorang debitor atas utang – utangnya yang telah jatuh tempo dan pembayaran tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan.⁹Dalam keadaan Pailit, seorang debitor telah berhenti membayar utang – utangnya, dan atas permintaan para kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit dan harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan selaku

⁶Bryan A., Garner, *Black Law’s Dictionary*, West Group, St. Paul, 1999, hlm.8

⁷Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.11

⁸ Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹Andriani Nurdin, *Op.Cit.*, hlm.130

pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dimanfaatkan oleh semua kreditor.¹⁰

2. Syarat – Syarat Kepailitan

Dalam Undang – Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa seorang debitor yang memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Dari adanya ketentuan tersebut menyebabkan seorang debitor hanya dapat diajukan permohonan pailit apabila memenuhi keadaan dan syarat – syarat berikut¹¹

- 1) Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditor;
- 2) Debitor tidak mempunyai lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya;
- 3) Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih.

Aturan tersebut menjadi suatu syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pailit. Dan yang dimaksud kreditor pada penjelasan Pasal 2 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU adalah

¹⁰R. Suberkti dan Tjitrosoedibyo, **Kamus Hukum**, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989, hlm.85

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, Jakarta, Grafiti, 2009, hlm.33

kreditor konkruen, preferen, dan separatis.¹² yang mana setiap kreditor tersebut memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor apabila kreditor mampu membuktikan bahwa debitor memiliki dua utang yang tidak dibayar dan telah jatuh tempo.

3. Pihak yang Dapat Mengajukan Kepailitan

Undang – Undang Kepailitan dan PKPU memberikan batasan – batasan terhadap pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1),(2),(3),(4),(5) yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain :

1) Debitor

Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”¹³

Berdasarkan pasal tersebut seorang debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, namun dalam pengajuan permohonan pailit ini debitor tetap harus dapat membuktikan dimuka pengadilan bahwa debitor yang bersangkutan sebagaimana persyaratan pailit yang ditentukan

¹²Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik kreditor konkruen, preferen, separatis. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

¹³*Ibid*, Pasal 2 Ayat (1)

dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

2) Kreditor

Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh kreditor sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam Undang – Undang Kepailitan sepanjang kreditor mampu membuktikan bahwa debitor yang bersangkutan memiliki lebih dari satu utang dari sekian banyak utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak dibayar lunas oleh debitor tersebut.

3) Kejaksaan

Permohonan pailit juga dapat diajukan oleh Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU apabila permohonan pailit tersebut mengandung unsur guna kepentingan umum masyarakat. Dalam hal kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit apabila persyaratan dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi dan tidak ada yang mengajukan permohonan pailit.¹⁴ Yang dimaksud dengan kepentingan umum menurut Undang – Undang Kepailitan dan PKPU adalah:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

¹⁴Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2005, hlm.41

- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;
- f. Dalam hal lainnya menurut kejaksan merupakan kepentingan umum.

4) Bank Indonesia

Dalam hal permohonan pailit ditujukan kepada bank pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan menurut Undang – Undang Kepailitan dan PKPU adalah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Adapun penjelasan bank yang dimaksud dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU adalah:

“Yang dimaksud dengan bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan. Pengajuan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata – mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank,

pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundangan”¹⁵

Dalam kepailitan bank semua harta yang dtitipkan kepada bank tidak termasuk kedalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada yag bersangkutan.¹⁶

5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Permohonan pailit yang ditujukan kepada debitor yang merukapan Perusahaan Efek, Lembaga Kliring dan Peminjaman, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka yang berwenang dalam mengajukan permohonan pailit adalah Bapepam sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

6) Menteri Keuangan

Dalam hal permohonan ditujukan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka, yang berhak mengajukan permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU adalah hanya Kementerian Keuangan.

4. Asas – Asas Kepailitan

¹⁵ Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, *Op.Cit*, Penjelasan ketentuan umum

¹⁶ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm.48

Dalam Penjelasan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa undang – undang tersebut di dasar kan pada beberapa asas yang akan diterapkan dalam kepailitan antara lain¹⁷

1) Asas Keseimbangan

Beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU merupakan perwujudan dari asas keseimbangan disatu pihak, guna mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para pihak yang tidak jujur dan ketentuan yang mencegah kreditor yang beritikad tidak baik.¹⁸

2) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang – Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan¹⁹

3) Asas Keadilan

Dalam Kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa eadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan mencegah terjadinya kesewenang – wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing – masing debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya²⁰

4) Asas Integrasi

¹⁷ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hlm. 16

¹⁸ Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, *Op. Cit*, Penjelasan ketentuan umum

¹⁹ Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, *Op. Cit.*, Penjelasan ketentuan Umum

²⁰ *Ibid*

Asas Integerasi dalam Undang – Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem perdata dan hukum acara perdata nasional.²¹

B. Tinjauan Umum tentang PKPU

1. Pengertian PKPU

Pada Pasal 222 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU mengatur ketentuan tentang Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*Suspension of Payment*) adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang – Undang berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga yang pada masa telah ditetapkan pihak debitor dan kreditor diberikan kesempatan untuk merumuskan rencana – rencana dalam pembayaran utang, termasuk merestrukturisasi utang bila diperlukan. Dalam hal ini PKPU sebenarnya merupakan sejenis moratorium berupa *Legal Moratorium*.²² PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitor yang bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor membuat laba.²³ Dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU diatur, debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya sedang dalam kesulitan untuk membayar yang memungkinkan untuk berhenti membayar dapat mengajukan permohonan PKPU guna diberikannya waktu dan

²¹ *Ibid*

²² Munir Fuady, *Op. Cit.* hlm.175

²³ Andriani Nurdin, *Op. Cit.*, hlm.248

kesempatan melakukan reorganisasi usaha atau restrukturisasi utangnya kepada pengadilan sebelum adanya putusan pailit.

Yang dimaksud dengan tundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang – undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara – cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran atau seluruh utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.²⁴ PKPU tidak dilakukan karena keadaan debitor tidak mampu membayarkan utangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan harta terhadap kekayaan debitor.

PKPU tidak dimaksudkan hanya semata untuk kepentingan debitor semata, tetapi juga untuk kepentingan kreditor, terutama kreditor konkruen. Pada dasarnya dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (1) permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor ataupun kreditor. Dalam hal debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak dibidang publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3),(4),(5).²⁵ Jadi pihak yang seharusnya aktif dalam mengajukan PKPU ini adalah debitor yang dapat memperkirakan bahwasannya tidak akan mampu melanjutkan

²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm.177

²⁵ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm.191

pembayaran utangnya, yang mana permohonan tersebut telah disepakati dan ditanda tangani oleh debitor dan kreditor bersama – sama dengan advokat yang telah memiliki izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Namun pada dasarnya tidak menutup kemungkinan bahwa kreditor untuk mengajukan kepada debitornya, selama kreditor dapat memperkirakan bahwasannya debitornya tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, guna debitor mengajukan rencana – rencana perdamaian yang meliputi pembayaran sebagian utang atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (3) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Pada praktik hukum dalam suatu perkara yang telah diajukan dimuka pengadilan termohon dapat melakukan perlawanan atau menangkis atas perkara yang ditujukan kepadanya yang dikenal dengan istilah eksepsi. Khususnya pada perkara kepailitan, PKPU dapat digunakan sebagai penangkis atau perlawanan yang diajukan termohon yang hendak dipailitkan untuk memohon agar tidak dipailitkan.²⁶ Pada keadaan tersebut menurut Pasal 271 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU:

“Apabila permohonan penrytaan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat bersamaan, maka permohonan penundaan utang harus diperiksa dahulu”

²⁶ Syamsudin M Sinaga, **Hukum Kepailitan Indoneisa**, Jakarta, PT. Tatanusa, 2012, hlm.281

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih didahulukan dari permohonan kepailitan sebagai upaya penyelesaian pembayaran utang.

2. Syarat Pengajuan Permohonan PKPU

Pada Pasal 222 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan PKPU tidak terbatas hanya debitor saja namun juga memberikan kesempatan kepada kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Pengajuan permohonan PKPU harus disertakan dengan bukti – bukti yang dapat membuktikan bahwa debitor tersebut memiliki lebih dari satu kreditor dan berada dalam keadaan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang – utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 224 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU

Setelah pengajuan permohonan selesai PKPU terbagi menjadi dua tahap, sebagai berikut:

1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

Dalam hal PKPU, baik debitor atau kreditor dapat mengajukan PKPU sementara. Dalam hal debitor yang mengajukan permohonan PKPU, setelah selesainya pemeriksaan administratif terpenuhi dalam waktu paling lambat tiga hari setelah didaftarkan permohonan PKPU pengadilan

harus mengabulkan permohonan tersebut.²⁷ Apabila permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut selambat – lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari semenjak didaftarkan permohonan tersebut. Kemudian pengadilan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat pengurus.²⁸ Putusan PKPU sementara hanya berlaku maksimum selama 45 (empat puluh lima) hari dan setelah itu harus diputus dilanjutkan PKPU tetap.

2) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap

Setelah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak dietapkannya PKPU sementara pengadilan harus menyelenggarakan sidang PKPU tetap guna memutuskan apakah dapat diberikan PKPU tetap kepada debitor. Adapun syarat diterimanya PKPU tetap adalah sebagai berikut:²⁹

A. Mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor konkruen yang haknya diakui yang hadir dan mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh taguhan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkruen atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;

B. Mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan

²⁷ Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu, *Op.Cit.*, Pasal 225 Ayat (2)

²⁸ *Ibid*, Pasal 225 Ayat (3)

²⁹ *Ibid*, Pasal 229 Ayat (1)

fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili sedikitnya 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Putusan PKPU tetap memiliki jangka waktu berlakunya paling lama tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak putusan PKPU Tetap tersebut diucapkan dimuka pengadilan.

3. Akibat Hukum PKPU

1) Terhadap tindakan hukum debitur

Selama PKPU berlangsung debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seuruh sebagian hartanya.³⁰ Dan selama PKPU debitur tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.³¹ Jadi selama dalam masa PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 debitur tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan pengurusan terhadap harta kekayaannya tanpa persetujuan dari pengurus. terkecuali tindakan hukum yang yang dapat menguntungkan kekayaan debitur, debitur tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pengurus.

2) Terhadap Hutang Debitur

Pasal 242 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

³⁰Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm.211

³¹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm.356

“selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.”

Dengan demikian segala hutang maupun pembayaran, atau penyitaan terhadap harta debitor semenjak ditetapkannya PKPU tetap haruslah ditangguhkan terkecuali terhadap pembayaran dan sitaan tersebut telah ditetapkan lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus sebagaimana yang termuat dalam Pasal 245 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.³²

3) Terhadap Perjanjian Timbal Balik

Pasal 249 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan:

“Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut”

Dengan demikian terhadap segala perjanjian timbal balik yang dilakukan debitor kelanjutan dari pelaksanaannya akan dilimpahkan kepada pengurus dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh pengurus dan pihak yang bersangkutan.³³

4) Terhadap Perjanjian Untuk Menyerahkan Barang

³² Rahayu Hartini, *Op.Cit.* hlm.235

³³ *Ibid*, hlm.239

Terhadap perjanjian penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa dengan penyebutan tenggang waktunya yang dilakukan oleh debitur setelah diberikannya PKPU sementara oleh pengadilan niaga maka terhadap perjanjian tersebut dinyatakan hapus namun dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkruen untuk mendapat ganti rugi.³⁴

5) Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 251 Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Dalam hal debitur bertindak sebagai penyewa suatu barang, maka dengan kewenangan pengurus dapat mengakhiri sewa tersebut untuk sementara dengan memberikan pemberitahuan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan keadaan adat kebiasaan setempat”

Dalam hal debitur memiliki perjanjian sewa menyewa, pengurus dapat menghentikan perjanjian tersebut dengan syarat melakukan pemberitahuan kepada pihak yang terkait terlebih dahulu.³⁵ Dan apabila pengurus melakukan penghentian tersebut berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU maka harus diindahkan dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari adalah cukup. Sejak hari putusan PKPU sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta debitur.³⁶

C. Tinjauan Umum BUMN

1. Pengertian BUMN

³⁴ *Ibid*, hlm.241

³⁵ *Ibid*

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.363

Definisi mengenai Badan Usaha Milik Negara dirumuskan pada Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) adalah:

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan unsur dari BUMN antara lain:

- 1) Badan usaha atau perusahaan
- 2) Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh negara
- 3) Penyertaan modal secara langsung oleh negara
- 4) Modal penyertaan dari kekayaan negara yang dipisahkan

Adapun maksud dari tujuan didirikannya BUMN dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN:

- a. Memberi sumbangan terhadap perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
- b. Mengejar keuntungan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak

- d. Menjadi perintis kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Selanjutnya mengenai permodalan BUMN sendiri diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) yang menyatakan sumber modal BUMN bersumber dari:

- 1) Anggaran pendapatan belanja negara, termasuk APBN yaitu proyek – proyek pemerintah yang dikelola oleh bumh atau piutang negara yang dijadikan penyertaan modal;
- 2) Kapitalisasi candangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan;
- 3) Sumber lainnya, termasuk dalam kategori ini antara lain keuntungan revaluasi asset.

Dan dalam hal ini menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 BUMN terbagi menjadi 2 bentuk yaitu Perusahaan Umum dan Perusahaan Persero.³⁷

2. Bentuk – bentuk BUMN

2.1. Perusahaan Umum

Pengertian mengenai Perusahaan Umum (Perum) termuat dalam Pasal 1 Angka (4) Undang – Undang BUMN yang menyebutkan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan

³⁷ Ridwan Kahirandy, **Pokok – Pokok Hukum Dagang**, Yogyakarta, FHUI Press, 2013, hlm.45

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.³⁸ Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Perum memiliki Unsur – Unsur:

- 1) Badan usaha
- 2) Seluruh modal dimiliki negara
- 3) Modal tidak terbagi atas saham
- 4) Bertujuan untuk kemanfaatan umum sekaligus untuk mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.

Selanjutnya, Perum dalam menjalankan kegiatannya mengacu pada maksud serta tujuannya diatur dalam Pasal 36 Undang – Undang BUMN antara lain:

- 1) Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik
- 2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Adapun perum terdiri atas organ – organ yang meliputi Menteri, Direksi, dan dewan Pengawas. Menteri memberikan izin pengembangan usaha atas usulan direksi, dan menteri tidak

³⁸Kurniawan, **Hukum Perusahaan**, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, hlm.104

bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perum dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perum yang melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan dalam perum.³⁹

2.2. Perusahaan Persero

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang BUMN disebutkan bahwa:

“Perusahaan Persero yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan persero memiliki unsur antara lain:

- 1) Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas
- 2) Modalnya terbagi atas saham
- 3) Paling sedikit 51% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
- 4) Bertujuan mengejar keuntungan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang – Undang BUMN terhadap Persero segala ketentuan dan prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang perseroan terbatas.⁴⁰ Maksud dan tujuan dari didirikannya persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan

³⁹ *Ibid*, hlm.151

⁴⁰ Andriani Nurdin, *Op.Cit*, hlm.240

berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.⁴¹

Selanjutnya persero memiliki organ – organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.⁴² Dalam hal Persero BUMN Menteri bertindak selaku RUPS apabila seluruh saham persero dikuasai oleh Negara dan bertindak sebagai pemegang saham apabila pada persero tersebut terbagi dalam saham.⁴³



BAB III

⁴¹ Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm.122

⁴² *Ibid*, hlm. 125

⁴³ *Ibid*

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penelitian kaidah – kaidah atau norma – norma dalam Hukum Positif.⁴⁴ Penelitian ini mengkaji perbedaan atas dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁵ Pada penelitian ini peraturan perundangan yang akan diteliti adalah Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁴⁴ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, Bayumedia Publishing, 2007, hlm.295

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum, dengan menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis putusan hakim dalam perkara PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines dan PT. Istaka Karya yang merupakan BUMN dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan – bahan hukum yang bersifat mengikat dan dijadikan sebagai sumber utama bahan penulisan. Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas dan bersifat autoritatif.⁴⁷ Bahan – bahan hukum tersebut terdiri dari :

- i. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- ii. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- iii. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- iv. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁴⁶ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.268

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.181

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan atau *literature – literature* tambahan mengenai permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini. Selain itu, bahan hukum sekunder membantu memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- i. Buku – buku yang membahas hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- ii. Jurnal – jurnal hukum
- iii. Pendapat ahli hukum

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian, penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yang kemudian dianalisis berdasarkan teori – teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Kemudian diolah dengan cara mengutip tulisan – tulisan baik tulisan buku – buku, dokumen, karya ilmiah, maupun peraturan perundang – undangan.⁴⁸

2. Internet

⁴⁸ Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.99

Pengumpulan bahan – bahan hukum dengan cara mengakses *website* dan jurnal – jurnal yang dipublikasi secara *online* yang terkait dengan isu hukum yang penulis teliti.

Bahan hukum tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁴⁹

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian normative ini, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara membuat sistematisasi bahan – bahan hukum tertulis. Sistematisasi yang dimaksud adalah membuat klasifikasi terhadap bahan – bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Kemudian hasil dari analisis bahan hukum akan diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi yaitu:

1. Interpretasi sistematis yaitu interpretasi dengan cara menghubungkan antara satu pasal dengan pasal yang lain dari Undang – Undang yang saling berkaitan.
2. Interpretasi gramatikal yaitu interpretasi dengan cara penafsiran berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang – undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada definisi perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan,⁵⁰ lalu dihubungkan antara

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Hukum**, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.96

⁵⁰ Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Jakarta, Toko Gunung Agung,, 2002, hlm.164-165

satu pasal dengan pasal yang lain dilanjutkan dengan melakukan penafsiran terhadap Undang – Undang terkait.

F. Definisi Konseptual

1. Kepailitan adalah satu sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas berdasarkan putusan pailit pengadilan
2. Pailit adalah keadaan dimana debitor berhenti membayarkan utang atau tidak mampu mebayarkan utangnya kepada kreditor
3. PKPU adalah masa yang diberikan oleh kreditor kepada debitor untuk merencanakan pembayaran utang maupun untuk melakukan restrukturisasi utang.
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang – Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.
5. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang – Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
6. Badan Usaha Milik Negara adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara disertakan langsung melalui APBN.
7. Perusahaan Umum adalah BUMN yang seuruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi saham yang tujuan utamanya untuk menciptakan barang dan jasa bermutu tinggi untuk kemanfaatan publik.
8. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit

51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuannya utamanya mengejar keuntungan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Putusan PKPU Terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines

1. Kasus Posisi Putusan PKPU Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima surat permohonan PKPU terhadap salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines (Termohon). Termohon adalah Badan Usaha Milik Negara yang Kepemilikan sahamnya 96.99% dikuasai oleh negara dan 3.01% dikuasai oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Permohonan tersebut telah terdaftar pada kepaniteraan tertanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor Register 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. permohonan tersebut

diajukan oleh Aries Munandar selaku direktur utama PT. Prathita Titian Nusantara (Pemohon). Pemohon adalah badan usaha yang didirikan pada tanggal 01 Juli 1987 yang merupakan mitra kerja Termohon untuk memberikan pelayanan *Cargo* dan *Ground Handling* kepada PT Merpati Nusantara Airlines.

Pemohon telah melakukan kerjasama dengan Termohon sejak tahun 1987 dalam hal *Cargo* dan *Ground handling*. Dalam permohonannya pemohon menyebutkan bahwa Pemohon telah Menerbitkan surat pengakuan utang terhadap Termohon dengan Nomor MNA/DF/1008/KV3/2014 tanggal 17 April 2014, Berita Acara Rekonsiliasi Hutang Piutang tertanggal 16 April 2014, antara PT. Merpati Nusantara Airlines dengan PT. Prathita Titian Nusantara Per 31 Januari 2014, dan Berita acara Rekonsiliasi antara PT. Merpati Nusantara Airlines dengan PT. Prathita Titian Nusantara per tanggal 31 Desember 2013 dikarenakan tidak mampu untuk membayar uang pelayanan jasa GSE Kontraktual, Jasa Ground Handling, Jasa lain – lain distrik Jakarta, Jasa lain – lain Pusat, Hutang Hanggar MMF, Hutang barter tiket dan hutang sewa GSE.

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 Termohon belum juga melakukan pembayaran utangnya terhadap Pemohon, yang mana total jumlah utang Termohon sudah sebesar Rp. 80.675.511.819,- (delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) dan USD 77,671.31,-

(tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu point tiga puluh satu US Dollar). Dengan rincian hutang:

1. Jasa GSE Kontraktual, dengan total piutang sejumlah Rp. 38.016.000.000
2. Jasa Ground handling, dengan total piutang sejumlah Rp. 40.610.245.493,-
3. Jasa Lain – lain Distrik, Jakarta dengan total piutang sejumlah Rp. 69.431.684,-
4. Jasa Lain – lain Pusat, dengan total piutang sejumlah Rp. 264.623.107,-
5. Hutang Hanggar MMF, dengan total putang sebesar Rp. 1.384.263.694,-
6. Hutang Barter Tiket, dengan total piutang sejumlah Rp. 7.162.314.109,-
7. Hutang Sewa GSE, dengan total piutang sejumlah USD 77,671,31,-

Berdasarkan dokumen dan surat – surat tagihan yang telah disebutkan diatas Termohon telah terbukti tidak dapat melanjutkan pembayaran utang – utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih. Dan dalam hal ini pemohon membenarkan pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa termohon memiliki Utang – utang yang sebagaimana diuraikan diatas dan bersedia melakukan verifikasi lebih lanjut dengan Pemohon.

Berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah memperkirakan bahwa Termohon tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran utangnya,

Namun Demikian dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa masih melihat adanya kemungkinan termohon dapat melakukan pembayaran utangnya apabila diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan kewajiban utangnya, sesuai dengan rencana perdamaian yang akan disampaikan oleh Termohon.

Dalam Permohonannya disebutkan pula bahwa Pemohon\ masih Memungkinkan termohon untuk mengajukan rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran – penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehensif dan berkepastian hukum baik pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditornya.

Selain memiliki Utang terhadap Pemohon, Termohon juga telah terbukti meliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan kreditor lain, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT PPA dan PT. Kirana Mitra Mandiri. Dalam hal ini pemohon menyertakan bukti utang Termohon dengan PT Kirana Mitra Mandiri berupa:

1. Fotocopy Kwitansi dan Invoice PT. Kirana Mitra Mandiri sebesar Rp. 175.230.000
2. Fotocopy Kwitansi dan Invoice PT. Kirana Mitra Mandiri sebesar Rp. 104.940.000
3. Fotocopy Kwitansi dan Invoice PT. Lirana Mitra Mandiri sebesar Rp. 70.290.000

Berdasarkan hal tersebut Termohon tidak menyangkal keberadaan utang Pemohon terhadap Kreditor lain yang telah disebutkan. Dan dalam hal ini termohon membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh

pemohon. Termohon tidak melakukan pembelaan terhadap permohonan yang diajukan pemohon serta dalam jawabannya termohon memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon serta menyatakan bahwa terohon dijatuhkan dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan perkara PKPU Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pokok permasalahan dalam Putusan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines adalah mengenai status PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara tersebut termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik atau tidak. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pertimbangan hakim yang dikarenakan apabila PT. Merpati Nusantara Airlines adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Dalam Putusan PKPU dengan Nomor Register Perkara 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst hakim memberikan pertimbangan hukum atas permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Prathita Titian Nusantara Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU.81409.AH.01.02 Tahun 2008 (tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan) dan dalam Pasal 4 Tentang Modal Perseroan

disebut modal yang ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima triliyun rupiah) dari modal dasar tersebut ditempatkan dan diambil bagian oleh pemegang saham sebanyak Rp. 1.403.556.000.000,- (satu triliyun empat ratus tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta) atau 1.403.556 (satu juta empat ratus tiga ribu enam puluh delapan juta rupiah) saham dengan perincian 1.344.468.000.000,- (satu triliyun tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah) atau 1.344.468 (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan) saham negara Republik Indonesia dan Rp. 59.088.000.000,- (lima puluh sembilan miliar delapan puluh delapan juta rupiah) atau 59.088 (lima puluh Sembilan delapan puluh delapan) saham milik PT. Garuda Indoensia (persero) Jo. Bukti T-2 tentang pernyataan keputusan para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Merpati Nusantara Airlines (PT.MNA) diluar RUPS No.31 tanggal 26 Nopember 2014 dihadapan Notaris Asep Eka Nugraha dalam halaman 3 (tiga) huruf b disebutkan bahwa Keputusan para Pemegang Saham Perusahaan diluar Rapat mewakili 100% saham – saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor terdiri dari :

- 1) Negara Republik Indonesia sebesar Rp. 1.905.468,- (satu juta Sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh delapan) saham atau 96,99% (Sembilan puluh Sembilan koma enam puluh enam persen);
- 2) Perusahaan Perseroan PT. Garuda Indonesia, Tbk sejumlah 59,088 (lima puluh Sembilan koma delapan puluh delapan) saham atau setara dengan 3,01% (Tiga koma nol satu persen);
2. Bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut PT. Merpati Nusantara Airlines terbukti milik negara dan bergabung dalam Badan Usaha Milik Negara.
3. Bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN dengan memperhatikan Bukti T-8 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam ayat 1 disebutkan melakukan usaha dibidang Jasa Angkutan Negara serta optimalisasi, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan.
4. Bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan didirikannya PT. Merpati Nusantara Airlines dapat disimpulkan PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN yang melayani kepentingan publik.
5. Bahwa dalam kasus ini yang mengajukan permohonan PKPU adalah Aris Munandar selaku Direktur Utama PT. Prathita Titian Nusantara bukan Menteri Keuangan
6. Bahwa oleh karena yang mengajukan PKPU bukanlah Menteri Keuangan maka Pemohon bukan pihak yang berhak

7. Bahwa oleh karena itu perkara permohonan pemohon dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan serta bukti – bukti tersebut majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang bergerak dikepentingan publik sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh PT.Prathita Titian Nusantara tidaklah dapat diterima dikarenakan menurut Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang berhak untuk mengajukan PKPU terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik adalah Kementerian Keuangan.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim sebelum membahas hal substansial mengenai permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PT. Prathita Titian Nusantara dalam mengajukan permohonan. PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Dalam hal ini Pemohon adalah PT. PrathitaTitian Nusantara sebagai salah satu kreditor dari PT. Merpati Nusantara. Dalam artian sempit, kreditor Kreditor ialah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih terhadap wanprestasinya seorang

debitor terhadap perjanjian utang – piutang.⁵¹ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, utang dalam artian luas adalah segala bentuk wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang akan mengakibatkan kerugian terhadap kreditor sehingga timbul kewajiban debitor untuk membayarkan sejumlah uang terhadap utang tersebut.⁵² dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan diatas PT. Prathita Titian Nusantara dan PT Merpati Nusantara Airlines memiliki hubungan hukum dalam hal perjanjian penyediaan jasa *Ground Handling*. Dan dalam hal tersebut PT. Merpati Nusantara Airlines terbukti telah memiliki utang dengan PT. Prathita Titian Nusantara berdsarkan Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines. Dan dalam hal ini PT. Merpati Nusantara Airlines telah terbukti memiliki kreditur lain yaitu PT. Bank Mandiri dan PT. Kirana Mitra Mandiri sehingga telah terpenuhi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Pada Putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines adalah Badan Usaha milik Negara. hal itu didasarkan berdasarkan Bukti T-8 dan T-2 yang diajukan oleh termohon mengenai status kepemilikan saham dari PT. Merpati Nusantara Airlines yang mana pada Pasal 4 Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines menjelaskan bahwa kepemilikan saham dari PT. Merpati Nusantara Airlines 96.99% adalah dimiliki oleh Negara

⁵¹Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm.22

⁵²Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm.10

Republik Indonesia dan 3.01% dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejalan dengan maksud BUMN secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003. Apabila dicermati memang pada dasarnya PT. Merpati sudah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh negara, dalam hal ini saham PT. Merpati Nusantara Airlines lebih dari 51% dimiliki oleh negara.

Selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan dengan memperhatikan Bukti T-8 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan dari PT. Merpati nusantara Airlines yang menjelaskan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines melakukan usaha dibidang Jasa Angkutan Negara serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan guna menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan sehingga PT. Merpati Nusantara Airlines dapat dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik. Pada umumnya memang dari tujuan didirikannya suatu BUMN salah satunya adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Hal tersebut mengakibatkan PT. Prathita Titian Nusantara menjadi tidak berwenang untuk mengajukan permohonan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Karena dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah Kementerian Keuangan.

Selanjutnya majelis hakim langsung menyimpulkan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan Maksud dan tujuan PT sebagaimana yang disebutkan dalam Anggaran Dasar PT tanpa memperhatikan hal lain seperti jumlah kepemilikan saham atau bentuk dari Badan Usaha Milik Negara tersebut. Pada umumnya PT. Merpati Nusantara Airlines adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan persero, hal tersebut mengakibatkan PT. Merpati Nusantara Airlines terikat pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN tanpa mencermati BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Pada dasarnya Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU memberikan batas yang jelas terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham .

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 menjelaskan bahwa BUMN terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu perusahaan persero dan

perusahaan umum, perusahaan persero menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha negara yang seluruh atau sebagian modalnya sebanyak 51% dikuasai oleh negara dan ditujukan untuk meperoleh keuntungan. Sedangkan Perusahaan Umum menurut Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha negara yang seluruh modalnya dikuasai oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kepentingan umum berupa penyediaan barang dan jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan tinggi bersarkan prinsip pengelolaan perusahaan⁵³. Dan pada umumnya tujuan didirikannya suatu BUMN berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU BUMN salah satunya adalah untuk melaksanakan kemanfaatan umum baik hal tersebut BUMN berbentuk perum maupun persero. Perwujudan melaksanakan kemanfaatan umum tersebut dimuat dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN, penugasan khusus tersebut dikenal dengan sebagai pelayanan kegiatan umum atau *Public Service Obligation*.⁵⁴ Pasal 66 Undang – Undang BUMN menggunakan istilah “kemanfaatan umum” yang menggambarkan suatu bentuk “*services/pelayanan*” bagi publik/masyarakat. Menurut Pramudji, konsep pelayanan publik diturunkan dari *public service* yang berarti: “berbagai aktivitas yang

⁵³*Ibid.*, hlm.54

⁵⁴Andriani Nurdin, *Op.Cit.*, hlm.96

bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa”⁵⁵. Menurut Soetopo pelayanan umum diartikan sebagai :segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan perundang – undangan.⁵⁶ Pada Umumnya berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1998 BUMN persero memiliki tugas dan fungsi :⁵⁷

1. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
2. Memupuk keuntungan; dan
3. Dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum.

Karena pada dasarnya pelayanan umum tersebut muncul untuk memenuhi kepentingan umum/publik. Sehingga kedua hal tersebut berkesinambungan. Ketika membahas pelayanan umum tidak akan terlepas dari kepentingan umum/publik. Dalam buku sudikno metro kusumo sifat – sifat kepentingan umum/publik adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Menyangkut kepentingan bangsa dan negara;
2. Menyangkut pelayanan umum dalam masyarakat luas;
3. Menyangkut kepentingan rakyat banyak;
4. Menyangkut kepentingan pembangunan.

⁵⁵Paimin Napitupulu, **Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction**, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm.165

⁵⁶*Ibid*

⁵⁷Andriani Nurdin, *Op. Cit*, hlm.72

⁵⁸ Sudikno Merto Kusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.89

Dari keempat poin diatas dapat disimpulkan ukuran dari kepentingan umum antara lain adalah perlindungan untuk bangsa, peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan bangsa juga ketertiban masyarakat.⁵⁹ Apabila hal tersebut dikaitkan dengan dengan pengertian Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik yang dimaksud Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU terdapat perbedaan makna mengenai penjelasan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Pada penjelasan pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham yang mana hal tersebut menunjuk BUMN berbentuk Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angkat (4) Undang – Undang BUMN yang permohonan pailitnya harus diajukan oleh kementerian keuangan.

sebagaimana telah diuraikan diatas majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang lebih lanjut mengenai kategori Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, majelis hakim pengadilan niaga menyimpulkan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan maksud dan tujuan dari PT. Merpati Nusantara Airlines sebagaimana yang disebutkan dalam

⁵⁹*Ibid*

Anggaran Dasar Perusahaan dan Objek kegiatan dari PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai Jasa Angkutan Negara.

Berdasarkan hal tersebut majelis hakim hanya menilai BUMN secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya disertakan oleh negara dan menyelenggarakan kemanfaatan umum penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, sehingga PT. Merpati Nusantara Airlines dapat dikategorikan sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Namun dalam hal ini peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menilai BUMN yang dapat dipailitkan hanya dengan memenuhi unsur BUMN secara umum, karena pada dasarnya Undang – Undang Kepailitan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) menjelaskan lebih lanjut bahwa BUMN yang permohonan pailit atau PKPU dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan hanya BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. secara *argumentum a contrario* berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, maka Permohonan pailit terhadap BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dapat dilakukan secara langsung oleh kreditornya.⁶⁰ Apabila dicermati hal tersebut merujuk pada BUMN yang berbentuk

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 2

Persero, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 Ayat (5) tidak berlaku pada BUMN yang berbentuk persero dikarenakan BUMN persero tidak memenuhi unsur tidak terbagi atas saham yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Persero adalah sebagai suatu legal entity, identik dengan PT. yang merupakan pribadi hukum yang mandiri yang secara tegas mempunyai keterpisahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dengan masing-masing pribadi pemegang saham ataupun pengurusnya.⁶¹ Sebagai *legal entity*, PT dapat mengajukan permohonan pailit ataupun dimohonkan pailit. Sebagaimana hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UUK dan PKPU, bahwa yang dapat menjadi kreditur ataupun debitur adalah "orang".⁶² Pengertian kata "orang" dalam pengertian kreditur dan debitur dalam UUK dan PKPU tersebut meliputi orang pribadi (*personal entity*) ataupun badan hukum (*legal entity*). Perseroan Terbatas atau PT adalah "orang" dalam bentuk badan hukum (*legal entity*).⁶³ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN yang berbentuk Persero dapat dilakukan oleh kreditornya selama memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU

⁶¹Rahayu Hartini, **BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia**,Setara Press,Malang,2017, hlm.68

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Putusan PKPU Terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines

1. Kasus Posisi Putusan PKPU Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Parewa Katering (Pemohon) terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines (Termohon). Pemohon adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1991 dan bergerak dibidang penyedia jasa catering. Dalam hal ini termohon adalah salah satu Badan Usaha Milik Negarayang Kepemilikan sahamnya 96.99% dikuasai oleh negara dan 3.01% dikuasai oleh PT. Garuda Indonesia, yang berbentuk dan berdasarkan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang jasa angkutan udara. Hubungan hukum antara pemohon dan termohon adalah mitra kerja dalam hal penyediaan jasa catering termohon pada distrik Denpasar dan Bima. Adapun alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon dikarenakan tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh termohon atas penyediaan catering yang telah dilakukan oleh pemohon.

Adapun setelah beberapa waktu termohon membayar tagihan jasa catering kepada pemohon, pada suatu titik termohon berhenti melakukan pembayaran kepada pemohon yaitu sejak bulan Oktober 2013. Bahwa atas tunggakan pembayaran tersebut termohon telah mengeluarkan surat pengakuan utang No. MNA/DZ/1477/KU.2/2014

tertanggal 9 September 2014. Adapun total utang (outstanding) termohon sampai dengan bulan Januari 2014 atas utang penyediaan jasa oleh pemohon adalah sejumlah Rp 2.459.449.480 (dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Dalam hal ini pemohon juga telah membuktikan bahwa termohon memiliki utang dengan kreditur lain yaitu:

1. PT. Prathita Titian Nusantara, dengan rincian utang sejumlah Rp. 80.675.511.819 (delapan puluh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus sembilnbelas rupiah) dan US\$ 77.671,31 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga puluh satu dolar); dan
2. PT. Kirana Mitra Mandiri, dengan rincian utang sejumlah Rp. 350.460.000 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran atas kewajibannya terhadap pemohon dan kreditur lainnya, sehingga pemohon mengajukan permohonan PKPU terhadap termohon agar dalam hal ini termohon segera mengajukan rencana perdamaian dengan memperhatikan telah terpenuhinya syarat – syarat diajukannya permohonan PKPU dengan unsur :

1. Termohon tidak dapat melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ; dan
2. Termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor

Dalam permohonan PKPU tersebut pemohon berpendapat bahwa Termohon adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dari PT. Merpati Nusantara Airlines dan modal dari PT. Merpati Nusantara Airlines tidak seluruhnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham yang mana saham dari termohon terbagi atas 96,99% dimiliki oleh negara dan 3,01% dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk . hal tersebut mengakibatkan bahwa dalam hal ini terhadap termohon berlaku prinsip – prinsip perseroan terbatas yang mengakibatkan termohon tunduk terhadap Undang- Undang Perseroan Terbatas, sehingga dalam hal ini pemohon berpendapat bahwa pemohon memiliki kewenangan dalam mengajukan permohonan PKPU yang dikarenakan termohon bukan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Pada jawaban atas permohonan tersebut termohon membenarkan dalil dari pemohon bahwa dalam hal ini termohon adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa angkutan udara yang berbentuk perseroan terbatas dan melakukan usaha untuk mengejar keuntungan yang sebagaimana dimaksud oleh pemohon. Dan

termohon membenarkan dalil pemohon yang menyatakan bahwa saham dari termohon masih terbagi atas saham yang dengan demikian mengakibatkan termohon tunduk terhadap Undang – Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya dalam jawabannya termohon juga menyebutkan bahwa termohon tidak membantah atau membenarkan segala dalil atas utang yang disampaikan oleh pemohon dan adapun perincian utang terhadap kreditur lain akan diverivikasi lebih lanjut.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengaidlan Negeri Surabaya dalam Putusan perkara PKPU Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

Pada Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby hakim pengadilan niaga sebelum mempertimbangkan substansi permohonan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai keabsahan atau legal standing dari pemohon terlebih dahulu. Dikarenakan dalam hal ini termohon adalah Badan Usaha Milik Negara yang apabila merujuk pada Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU jika dalam hal termohon adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka permohonan hanya dapat disampaikan oleh Kementerian Keuangan oleh karna hal tersebut dipandang perlu oleh hakim untuk mempertimbangkan apakah termohon dalam hal ini PT. Merpati Nusantara Airlines termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayata (5) Undang –

Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam mempertimbangkan kedudukan Termohon sebagai Badan Usaha Milik Negara hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa merujuk pada Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU (vide Bukti P.9-B) telah disebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham ” ;
2. Menimbang, bahwa terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut diatas apabila dikaitkan dengan pengertian Perum sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka (4) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN) sesuai bukti P – 9.C, dapat diperoleh adanya pengertian bahwa “ Perusahaan umum, selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum “ ;
3. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari pembentuk Undang-undang bahwa apa yang dimaksud BUMN dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUKPKPU adalah Perusahaan Umum (Perum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUBUMN. Dan apabila merujuk pada anggaran dasar Termohon PKPU telah jelas disebutkan bahwa modal Termohon PKPU terbagi atas saham dan 3,01% diantara keseluruhan saham Termohon PKPU dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Kemudian pada website resmi PT Garuda Indonesia dapat diketahui juga bahwa 39,5% sahamnya dimiliki oleh umum/publik ;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 yaitu berupa Anggaran Dasar Termohon PKPU No.102 tanggal 15 Agustus 2008 pada pasal 3 telah diatur mengenai maksud dan tujuan Termohon PKPU ,dimana “Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan kegiatan usaha dibidang jasa angkutan udara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip prinsip perseroan terbatas ;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada susunan saham dan Pasal 3 anggaran dasar Termohon PKPU maka dapat disimpulkan bahwa Termohon PKPU adalah BUMN yang berbentuk perseroan

terbatas yang modalnya terbagi atas saham dan seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan “,Sehingga dengan demikian Dengan demikian terbukti bahwa Termohon PKPU bukan lah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 jo pasal 2 ayat (5) UUKPKPU, sehingga Pemohon PKPU memiliki legal standing (Persona standi in judicio) untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU. ;

6. Menimbang, bahwa apakah permohonan PKPU tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan undang Indang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, maka setelah majelis meneliti surat permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU tersebut ternyata permohonan PKPU tersebut telah ditanda tangani oleh para Pemohon PKPU yaitu Chandra Susanto selaku Direktur dari pemohon PKPU dan Aisyah Aiko Pulukadang SH dan berlian Dumaris Simbolon, S.Si,SH. selaku kuasa hukum dari Pemohon PKPU, sehingga dengan demikian terhadap permohonan PKPU tersebut secara formal telah sah menurut hukum ;
7. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU telah memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 2 ayat (1) UUKPKPU, maka dengan merujuk Pasal 225 ayat (3) UUKPKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh pemohon PKPU tersebut apalagi berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Termohon PKPU menyatakan bahwa ” Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan kegiatan usaha dibidang jasa angkutan udara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas “;

Pada pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa dalam hal ini termohon bukan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini terdapat kesesuai pandangan hakim dengan pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak dapat dikatakan Badan Usaha

Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik dikarenakan kepemilikan modal dari badan usaha tersebut tidak 100% dimiliki oleh negara dan atas modal tersebut masih terbagi atas saham, hal tersebut dipandang oleh hakim tidak sesuai dengan maksud Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU karena yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU adalah Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

Setelah mencermati hal tersebut dalam Putusannya Majelis hakim melakukan pertimbangan terhadap Utang termohon kepada para kreditor. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan dalam hal ini debitor terbukti secara jelas memiliki utang kepada PT. Parewa Katering dengan adanya surat pengakuan utang No MNA/DZ/1477/KU.2/2014 (Bukti P – 6), dan utang terhadap kreditor lain yaitu PT. Prathita Titian Nusantara dengan adanya surat pengakuan utang No. MNA/DF/1008/KU3/2012 tanggal 17 April 2014 (Bukti KL – 8). Berdasarkan perimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa dalam hal ini termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor oleh karena hal tersebut permohonan pemohon telah memenuhi syarat Pasal 222 Ayat (1) jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dan dalam amar putusannya majelis

hakim mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

Pada Putusan perkara Nomor 04/Pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby majelis hakim dalam pertimbangannya sebelum membahas materi substansial yang diajukan oleh pemohon terlebih dahulu membahas mengenai kedudukan (*Legal Standing*) dari pemohon. Hal tersebut dikarenakan dalam hal ini termohon adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang mana dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa dalam hal termohon adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka permohonan Kepailitan dan PKPU hanya dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan.

Selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa pemohon adalah pihak memiliki kewenangan (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan kepada termohon dikarenakan dalam hal ini Pemohon telah memenuhi Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini pemohon adalah PT. Parewa Katering yaitu salah satu kreditor dari PT. Merpati Nusantara

Airlines. Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata – mata dari perjanjian utang – piutang.⁶⁴ Pada perkara tersebut dijelaskan bahwa PT. Parewa Katering dan PT. Merpati Nusantara Airlines terikat pada perjanjian penyediaan jasa katering maskapai dan telah terbukti memiliki hutang berdasarkan Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh PT. Merpati Nusantara Airlines. Yang dimaksud dengan utang dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yakni :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang – undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”

Kartini Mulyadi menjelaskan bahwa utang merupakan prestasi dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan bila tidak dipenuhi kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta debitor⁶⁵ dan pada umumnya seorang Kreditor mungkin saja memiliki lebih dari satu piutang atau tagihan yang diperlakukan secara berbeda – beda di dalam proses kepailitan.⁶⁶ dan dalam hal ini dijelaskan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines juga terikat utang dengan 2 (dua) kreditor lainnya yaitu PT. Prathita Titian Nusantara dan PT. Kirana Mandiri. Berdasarkan

⁶⁴Adrian Sutedi, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.32

⁶⁵Kartini M, G. Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.10

⁶⁶Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm.33

uraian tersebut maka peneliti sependapat dengan majelis hakim yang menyatakan bahwa dalam perkara tersebut telah terpenuhi unsur Pasal 222 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Selanjutnya dalam putusannya majelis hakim juga menyimpulkan dalam pertimbangannya bahwa dalam hal ini termohon adalah BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham dan seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan dan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines telah diatur Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan kegiatan usaha dibidang jasa angkutan udara, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip prinsip perseroan terbatas, sehingga dengan demikian termohon bukan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Apabila merujuk pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara hal

tersebut sesuai dengan kualifikasi BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum).⁶⁷ Hal tersebut dapat terlihat dari status kepemilikan saham dari Perum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 bahwa Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.⁶⁸ Apabila pengertian BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dikaitkandengan Perum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 memiliki kesesuaian dalam status kepemilikan atau penguasaan modal oleh negara terhadap suatu BUMN.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya status kepemilikan modal termohon masih terbagi atas saham yang 96,99% dimiliki oleh Negara dan 3,01% dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa termohon adalah BUMN berbentuk perseroan dikarenakan kepemilikan modal termohon masih terbagi atas saham sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang tentang Badan Usaha Milik Negara yang menjelaskan Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki

⁶⁷Andriani Nurdin, *Op.Cit.*, hlm.219

⁶⁸*Ibid*

oleh negara yang mengejar keuntungan. Dan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dijelaskan bahwa BUMN Perum dan Persero memiliki tujuan yang berbeda. BUMN persero bertujuan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003, sedangkan Perum bertujuan menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa termohon adalah BUMN perseroan yang bertujuan mengejar keuntungan bukan BUMN yang bertujuan untuk menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum, sehingga dalam hal ini jelas termohon bukanlah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga permohonan PKPU tidak harus diajukan oleh Kementerian Keuangan. Dan dalam hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa permohonan yang diajukan oleh PT. Parewa Katering telah memenuhi unsur Pasal 222 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang mana dalam hal ini PT. Merpati Nusantara Airlines telah Memenuhi Unsur yaitu memiliki utang

terhadap 2 kreditor dan memiliki setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan surat pengakuan utang terhadap PT Parewa Katering dan PT. Prathita Titian Nusantara.

Dalam hal ini peneliti sependapat terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Parewa Katering karena PT. Merpati Nusantara Airlines telah terbukti bukan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU serta telah memenuhi syarat diajukan PKPU yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

C. Analisis Inkonsistensi hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dalam Putusan perkara PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines

1. Analisis Hak mengajukan Permohonan Pailit atau PKPU berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur secara umum BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang disertakan secara langsung melalui kekayaan yang terpisah. Namun dijelaskan pula bahwa BUMN terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu perusahaan

perseroan (persero) dan perusahaan umum (umum). Pengertian perusahaan persero menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah BUMN yang seluruhnya atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang maupun jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.⁶⁹

Undang – Undang Kepailitan dan PKPU mengatur apabila “debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, Permohonan pernyataan pailit hanya diajukan oleh Kementerian Keuangan.” Menurut Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, BUMN dapat di pailitkan baik itu berbentuk Persero atau Perum namun apabila debitor adalah BUMN yang memiliki peran strategis dalam kepentingan publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU maka permohonan hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.⁷⁰ Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada peluang bagi debitor lain untuk mengajukan permohonan pailit kepada BUMN yang bergerak di

⁶⁹ Muljadi K & Widjaja G. **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 141

⁷⁰ Mulyadi, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik**, Bandung, Aumni, 2010, hlm. 80

kepentingan publik, kecuali Menteri Keuangan karena dianggap sebagai pihak yang memahami perekonomian Nasional.⁷¹ Menurut Andriani Nurdin dalam bukunya tentang Kepailitan BUMN persero berdasarkan asas kepastian hukum bahwa Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU perlu ditelaah lebih lanjut dengan melihat bagian penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham⁷², yang diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur Seluruh Modalnya Dimiliki oleh Negara

Pada dasarnya modal BUMN baik seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh negara dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian dari kekayaan negara yang dipisahkan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 “adalah Pemisahan kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.” Dan pada penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

⁷¹*Ibid*, hlm. 81

⁷²Andriani Nurdin, *Op.Cit*, hlm. 210

melainkan didasarkan pada prinsip –prinsip perusahaan yang sehat.⁷³ dan dalam hal tersebut kepemilikan modal yang dikuasai 100% oleh negara tidak terbatas hanya pada BUMN yang berbentuk Perum, Namun BUMN berbentuk Persero kepemilikannya juga bisa seluruhnya dimiliki oleh negara karena dalam Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 disebutkan bahwa seluruhnya atau paling sedikit 51% kepemilikan modal harus dikuasai oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan guna mencari keuntungan, sehingga kedudukan modal 100% dikuasai oleh negara berpengaruh terhadap bentuk dari BUMN. Karena dalam hal ini yang menjadi perbedaan antaran BUMN bentuk Perum dan Persero adalah apakah modal tersebut terbagi atas saham atau tidak. Karena pada dasarnya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 memperbolehkan kepemilikan modal BUMN perseroan 100% dimiliki oleh negara atau tidak.

Dalam hal saham 100% dimiliki oleh negara, maka kedudukan Menteri bertindak sebagai RUPS. Sebaliknya, jika saham kurang dari 100% maka kedudukan menteri sebagai pemegang saham dan berlakunya ketentuan Perseroan Terbatas terhadap BUMN tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 Undang – Undang Perseroan Terbatas.⁷⁴

2. Unsur tidak terbagi atas saham

⁷³Andriani Nurdin, *Op.Cit*, hlm.241

⁷⁴Andriani Nurdin, *Op.Cit*, hlm. 243

Mengenai unsur tidak terbagi atas ini dapat kita lihat dalam Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai definisi dari perum. Ketentuan ini berdampak bahwa permodalan BUMN jenis perum diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah dan tidak mengikuti konsep pengelolaan perusahaan seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Berbeda seperti yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 10 Ayat (8) yang mengatur bahwa permodalan perseroan terbatas terbagi atas modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan dan terbagi atas saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh perseroan beserta dengan nilai nominal setiap saham yang diterbitkan tersebut.

Ketentuan mengenai permodalan yang terbagi atas saham ini sama dengan konsepsi modal perseroan yang terbagi atas saham dimana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara.⁷⁵Dalam hal BUMN di privatisasi maka setiap orang maupun badan hukum dapat menjadi pemilik atas saham suatu BUMN apabila dilakukan privatisasi.⁷⁶Namun pada dasarnya dimungkinkan bahwa BUMN persero kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh negara namun tetap terbagi atas saham seperti PT.

⁷⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm .57

⁷⁶Sunarmi, *Op.Cit*, hlm.406

Dirgantara Indonesia yang komposisi sahamnya 100% dimiliki negara dan terbagi atas kepemilikan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Dalam hal suatu BUMN 100% modalnya dikuasai oleh negara, namun tetap terbagi atas saham BUMN tersebut termasuk kategori BUMN yang berbentuk perseroan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003. Dengan terbaginya kepemilikan modal saham tersebut berimplikasi bahwa BUMN tersebut sederajat dengan suatu Perseroan terbatas sehingga terhadap BUMN berbentuk persero tunduk dan berlaku prinsip – prinsip Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang – Undang BUMN. Hal tersebut berimplikasi terhadap status entitas badan hukum publik BUMN hilang menjadi badan hukum privat. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa BUMN persero mendapatkan perlakuan yang sama seperti Perseroan Terbatas dalam hal Kepailitan .

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa terdapat kesamaan atau sinkronisasi mengenai pengaturan BUMN yang dimaksud dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dengan BUMN berbentuk perum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 dalam hal seluruh modalnya dikuasai negara dan tidak

terbagi atas saham. Untuk memperjelas bagaimana bentuk kesamaan BUMN dengan perum akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :⁷⁷

Tabel 4. 1

Tabel Sinkronisasi Pengertian BUMN dalam UU Kepailitan dan UU BUMN⁷⁸

	BUMN	Perum	Persero
Ketentuan	Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU	Pasal 1 Angka 4 UU Badan Usaha Milik Negara	Pasal 1 Angka 2 UU Badan Usaha Milik Negara
Definisi	BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh	BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau

⁷⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *OpCit*, hlm.17

⁷⁸ Andriani Nurdin, *Op.Cit*, hlm.67

	modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham	kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang perusahaan	paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan
Kepemilikan Modal	Seluruh modal dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham	Seluruh modal dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham	Terbagi dalam saham dan paling sedikit 51% dikuasai oleh Negara
Tujuan	Kepentingan publik	Kemanfaatan umum	Mengejar keuntungan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat sinkronisasi atau persamaan maksud BUMN dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dengan BUMN jenis perum

Pasal 1 Angka 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam hal tujuan utama dan permodalan BUMN tersebut. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tentang BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik memiliki kesamaan unsur dengan jenis BUMN berbentuk perum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003, sedangkan bagi BUMN yang berbentuk perseroan berlaku pula ketentuan Undang – Undang Perusahaan terbatas yang menyebabkan hilangnya entitas BUMN sebagai badan hukum publik dan menjadi badan hukum privat.

Sementara bila berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan lebih lanjut dihubungkan dengan Undang – Undang BUMN Pasal 1 angka 4, jelas-jelas bahwa yang dimaksudkan adalah BUMN Perum bukan Persero. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tersebut yang membedakan adalah mengenai modalnya, seluruhnya dimiliki oleh negara dan "terbagi atas saham" atau "tidak terbagi atas saham". Artinya Bila BUMN tersebut modalnya "tidak terbagi atas saham" dengan kata lain BUMN Perum, maka permohonan kepailitan diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai representasi negara sebagai pemilik modal.⁷⁹

⁷⁹Rahayu Hartini, *Op.Cit*, Hlm. 77

Apabila BUMN tersebut modalnya "terbagi atas saham", itu artinya BUMN Persero maka seharusnya menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yaitu permohonan kepailitan boleh diajukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri.⁸⁰ dalam Persero, Menteri Keuangan berkedudukan sebagai pemegang saham, sehingga hak dan kewajiban yang ada sama seperti pemegang saham biasa yang lainnya. Kewenangan Menteri Keuangan RI untuk mengajukan pernyataan kepailitan hanya untuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU menyatakan, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan penjelasan diatas apabila ada BUMN Persero telah memenuhi syarat untuk dipailitkan maka bukan merupakan kewenangan atau tidak harus Menteri Keuangan.⁸¹

2. Analisis Perbedaan Penafsiran Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU terhadap Permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara Airlines

Berdasarkan uraian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat Inkonsistensi hakim dalam memaknai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perbedaan pertimbangan majelis hakim pengadilan

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Andriani Nurdin, *Op.Cit*, Hlm.267

niaga jakarta pusat dan pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga surabaya dalam mengkategorikan PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Perbedaan tersebut terlihat ketika majelis hakim pengadilan niaga jakarta pusat memaknai BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU sebatas pengertian dan tujuan didirikannya BUMN secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 2 Angka 1 huruf c Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanpa memperhatikan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan PKPU dan sedangkan majelis hakim pengadilan niaga surabaya dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya. Hal tersebut berimplikasi terhadap kewenangan pengajuan permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara Airlines. Yang pada dasarnya dalam hal ini kedudukan PT Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang berbentuk Persero dengan perincian kepemilikan saham masih terbagi atas saham 96,99% milik negara dan 3,01% milik PT. Garuda Indoensia Tbk.

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menolak permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines yang diajukan oleh salah satu kreditornya yatu PT. Prathita Titian Nusantara. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines hanya dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut didasari karena PT. Merpati

Nusantara Airlines telah memenuhi unsur sebagai suatu BUMN dikarenakan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines berdasarkan maksud dan tujuannya melakukan usaha dibidang Jasa Angkutan Negara sehingga dinilai melakukan pelayanan publik. Dan berdsarkan hal tersebut majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Dengan demikian selain Kementerian Keuangan maka tidak ada pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan PKPU.

Sementara itu, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusannya mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines yang diajukan oleh salah satu kreditornya yaitu PT. Parewa Katering. Dalam putusannya majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan BUMN persero yang modalnya tidak seluruhnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham, sehingga dalam hal tersebut permohonan PKPU dapat diajukan oleh siapapun tidak harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut didasarkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan penjelasannya yang menentukan bahwa permohonan PKPU terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, yaitu

BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya majelis hakim menjelaskan bahwa yang dimaksud BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Dan hal tersebut merujuk kepada pengertian perum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang BUMN yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum. Selanjutnya majelis hakim menyimpulkan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham dan seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh negara yang tujuannya mengejar keuntungan.

Secara umum yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dikuasai oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Undang – Undang BUMN mengenal 2 (dua) bentuk BUMN, yaitu perusahaan perseroan (persero) dan perusahaan umum (perum). Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa BUMN yang berbentuk perseroan adalah BUMN yang modalnya terbagi atas saham dan seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan mengejar keuntungan. Adapun perum menurut Pasal 1 Angka 4 adalah BUMN yang modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum. Pada dasarnya baik

BUMN berbentuk Perum maupun Perseo dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, namun Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Kementerian keuangan.⁸² sementara untuk kepailitan terhadap BUMN persero sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat dilakukan oleh kreditornya selama memenuhi Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik memiliki unsur yaitu seluruh modal dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, hal tersebut bersifat kumulatif karena terdapat frasa “dan” yang mana apabila dicermati lebih lanjut bentuk BUMN yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU adalah BUMN yang berbentuk perum⁸³.

Status PT. Merpati Nusantara berdasarkan Anggaran Dasarnya PT. Nusantara Airlines adalah Persero dan kepemilikan modalnya masih terbagi atas saham.. Dan dengan demikian PT. Merpati Nusantara Airlines memenuhi karakteristik BUMN persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang BUMN yakni terbagi atas saham. Konsekuensi dari BUMN berbentuk perseroan ialah BUMN tunduk pada Undang – Undang Perseroan Terbatas

⁸²Andriani Nurdin, *Op.Cit.*, Hlm.294

⁸³*Ibid*

sehingga berimplikasi terhadap kedudukan BUMN sebagai badan hukum privat.⁸⁴ Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip – prinsip yang berlaku pada Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 11 Undang – Undang BUMN.⁸⁵

Terbaginya saham dari PT. Merpati Nusantara Airlines sebagaimana telah dijelaskan diatas menyebabkan tidak terpenuhinya unsur BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya. Berdasarkan hal tersebut permohonan pengajuan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines tidak harus melalui Kementerian Keuangan dikarenakan PT. Merpati Nusantara Airlines tidak termasuk dalam BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi hakim dalam penerapan pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU atas permohonan Kepailitan dan PKPU disebabkan karena kurang cermatnya hakim dalam memaknai BUMN yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa hakim jakarta pusat hanya memaknai BUMN secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang mana BUMN

⁸⁴*Ibid.*, Hlm.277

⁸⁵*Ibid*

yang dimaksud dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dan hal tersebut sejalan dengan pengertian BUMN perum dikarenakan perum memiliki kesamaan unsur tidak terbagi atas saham dengan BUMN yang dimaksud dalam Undang – Undang Kepailitan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi hakim dalam kepailitan BUMN terjadi pada bagian memaknai pengertian BUMN, yang mana hakim jakarta pusat menilai bahwa BUMN secara umum tanpa dielaborasi dengan pengertian BUMN yang dimaksud dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dan majlesi hakim surabaya memaknai BUMN yang ada pada Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dengan mengelaborasi dengan pengertian BUMN yang dimuat dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Setelah diuraikan diatas peneliti berpendapat bahwa yang dapat mengajukan Kepailitan dan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines adalah para pihak seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU hal tersebut dikarenakan bahwa kedudukan PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang berbentuk persero yang masih terbagi atas saham, sehingga hal tersebut mengakibatkan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines merupakan badan hukum privat dan sederajat dengan Perseroan Terbatas dan permohonan pailitnya dapat diajukan oleh para kreditornya ataupun direksinya sendiri selama memenuhi unsur Pasal 2

Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU karena Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang berlaku terhadap BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham yaitu BUMN yang berbentuk perum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadinya inkonsistensi hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU terhadap permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai BUMN, dikarenakan terdapat perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memaknai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya. Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Apabila dicermati ketentuan tersebut bersifat kumulatif dikarenakan adanya frasa “dan”, sehingga ketentuan tersebut merujuk kepada BUMN yang berbentuk perum bukan BUMN berbentuk persero yang seluruhnya atau sebagian minimal 51% modalnya dimiliki negara dan kepemilikan terbagi atas saham. Dalam hal ini PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang berbentuk persero dan kepemilikan sahamnya terbagi atas 96,99% dimiliki negara dan 3,01% dimiliki PT. Garuda Indonesia,Tbk. Oleh karena hal tersebut tidak berlaku ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa permohonan harus dilakukan oleh Kementerian

Keuangan, sehingga kreditor memiliki kapasitas dalam mengajukan permohonan selama terpenuhinya unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU oleh PT. Merpati Nusantara Airlines.

B. Saran

Adapun saran – saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian ini antara lain :

1. Untuk kedepannya Hakim lebih cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dengan memperhatikan aspek penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU bahwa ketentuan tersebut merujuk pada BUMN yang berbentuk perum yang permohonannya hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
2. Dalam waktu dekat ini akan diadakan suatu revisi terhadap Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk dilakukan suatu revisi dengan mempertegas ketentuan Pasal 2 Ayat (5) sehingga tercipta suatu pandangan yang sama oleh hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. **Seri Hukum Bisnis Kepailitan** (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ali, Achmad. **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)** (Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002)
- Fuady, Munir. **Hukum pailit dalam teori dan praktek** (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014)
- Garner, Bryan. **Black Law's Dictionary** (West Group, St. Paul, 1999)
- Hartini, Rahayu. **Hukum Kepailitan** (Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, 2005)
- Hartini, Rahayu. **Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU** (Malang, UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008)
- Hartini, Rahayu. **BUMN Persero: Kekayaan Negara dan Hukum Kepailitan Indonesia** (Malang, Star press, 2017)
- Ibrahim, Johny. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif** (Malang, Bayumedia Publishing, 2007)
- Kurniawan, **Hukum Perusahaan** (Yogyakarta, Genta Publishing, 2014)
- Mulyadi, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik** (Bandung, Alumni, 2010)
- Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum** (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009)

Napitupulu, Paimin. **Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction**
(Bandung, PT. Alumni, 2007)

Nasution, Bahder Johan. **Metode Penelitian Hukum** (Bandung, Mandar Maju, 2008)

Nurdin, Andriani. **Keapilittan BUMN Persero Berdasarkan Kepastian Hukum**
(PT. Alumni, Bandung, 2012)

Sinaga, Syamsudin M. **Hukum Kepailitan Indoneisa** (Jakarta, PT. Tatanusa, 2012)

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo. **Kamus Hukum** (Jakarta, Pradnya Paramita, 1989)

Sjahdeini, Sutan Remy. **Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan** (Jakarta, Grafiti, 2009)

Sutedi, Adrian. **Hukum Kepailitan** (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009)

Sunarmi, **Hukum Kepailitan : Edisi 2** (Jakarta, PT. Sofmedia, 2010)

Supramono, Gatot. **Hukum Perseroan Terbatas** (Jakarta, Djambatan, 2009)

Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum** (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007)

SKRIPSI, TESIS, DISETASI

Barus, A Josye. “TINJAUAN HUKUM PERMOHONAN PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO.37 TAHUN 2014 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU”. Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indoensia. Depok, Juni 2011

Ramadhani, Muhammad. “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SYARAT SAHNYA PAILIT TERHADAP BUMN SESUAI DENGAN UU

KEPAILITAN PADA KASUS PT DIRGANTARA INDONESIA”. Tesis

Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Depok, Desember 2008

Safitri, Nurul Fahriza. “KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK

NEGARA (BUMN): STUDI KASUS PT DIRGANTARA INDONESIA

(PESERO) DAN PT ISTAKA KARYA (PESERO)”. Tesis Program

Pascasarjana Universitas Indonesia. Depok, Juni 2012

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 15/Pdt.Sus-

PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 04/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

JURNAL

Hadjaloka, Loura. Ketidakcermatan Hakim Berujung Pada Disparitas Putusan:

Kajian atas berbagai Putusan Pengadilan Terkait Permohonan Pailit

terhadap Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Yudisial, Vol. 9 No.1

**TINJAUAN YURIDIS PERBEDAAN PENAFSIRAN PASAL 2 AYAT (5)
UNDANG – UNDANG KEPAILITAN DAN PKPU DALAM PUTUSAN
PERMOHONAN PAILIT ATAU PKPU TERHADAP BUMN (STUDI
KASUS PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES)**

**Faritz Putra Pangeran⁸⁶, Dr. Budi Santoso, S.H⁸⁷, LL.M., Ranintya Ganindha,
S.H.,M.H.⁸⁸**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Faritzputra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inkonsistensi Putusan hakim antara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Surabaya dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU pada perkara permohonan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat bahwa PT. Merpati Nusantara hanya dapat dimohonkan PKPU oleh Kementerian keuangan. Sedangkan Majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya berpendapat bahwa Permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara dapat diajukan oleh kreditornya. Penelitian ini membahas Mengapa hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga Surabaya memberikan dasar pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inkonsistensi putusan hakim dikarenakan adanya perbedaan pendapat hakim dalam memaknai Badan Usaha Milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya. Dalam hal ini Pengadilan Niaga Surabaya menerapkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya sedangkan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menerapkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tanpa memperhatikan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

⁸⁶ Mahasiswa, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

⁸⁷ Pebimbng I, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

⁸⁸ Pebimbng II, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

ABSTRACT

This study aims to analyze the Inconsistency of Judges' Decisions between the Central Jakarta Commercial Court and the Surabaya Commercial Court in the application of Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and *PKPU* Law on cases of *PKPU*'s application to PT. Merpati Nusantara Airlines as a State-Owned Enterprise. The Central Jakarta Commercial Court panel of judges argued that PT. Merpati Nusantara can only be requested to *PKPU* by the Ministry of Finance. While the Surabaya Commercial Court judges argued that the *PKPU* to PT. Merpati Nusantara can be submitted by its creditors. This study discusses why the judges of the Central Jakarta Commercial Court and the Surabaya Commercial Court have a different arguments in making a verdict on the case of the *PKPU* petition against PT. Merpati Nusantara Airlines. This research was conducted with a Juridical-Normative method with a statute approach and conceptual approach. The results of this study indicate that the inconsistency of the judge's decision was due to opinion differences of the judges in interpreting the definition of State-Owned Enterprises engaged in the public interest in Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and *PKPU* Laws along with their explanations. In this case, the Surabaya Commercial Court applies Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and *PKPU* Laws along with their explanations, while the Central Jakarta Commercial Court applies Article 2 Paragraph (5) of the Bankruptcy and *PKPU* Law without regard to the explanation of Article 2 Paragraph (5) of Bankruptcy and *PKPU* Laws.

A. Pendahuluan

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perserikatan perserangan”

Tindakan Pailit adalah suatu sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim pengawas.

Apabila kepailitan adalah upaya terakhir dalam pembayaran utang dengan cara sita umum berbeda hal dengan halnya PKPU, PKPU adalah upaya perdamaian atau penyelamatan usaha yang dilakukan antara debitor dan kreditor dengan pembayaran utang yang bermasalah dengan cara merestrukturisasi kembali perjanjian dan memberikan kelonggaran waktu bagi debitor dalam melakukan pembayaran utang.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) menjelaskan kepailitan ditujukan bagi kreditor yang memiliki dua atau lebih kreditor yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Mengenai Kepailitan terhadap BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang –

Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan Pailit suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah menteri keuangan, yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik menurut Pejelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara menjelaskan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melaui penyertaan secara langsung yang beraal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Definisi kekayaan Negara yang dipisahkan menurut Pasal 1 angka 10 UU BUMN adalah yang pada intinya penyertaan modal Negara yang dalam Persero dan/atau perum maupun Perseroan terbatas lainnya berasal dari APBN yang merupakan bagian dari kekayaan Negara.⁸⁹ Apabila dicermati kembali hal tersebut menimbulkan perbedaan terhadap pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dalam hal pemberian kewenangan pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN.

Hal tersebut menyebabkan ketidaksepahaman dalam tubuh kehakiman dalam memtus perkara Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN, apabila yang menjadi termohon seperti PT. Merpati Nusantara Airlines yang mana PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang

⁸⁹ Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

kepemilikan sahamnya 96,99% dimiliki oleh negara dan 3,01% sahamnya dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk.

Berdasarkan penjabaran kasus tersebut pada praktiknya terdapat inkonsistensi putusan hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan terhadap perkara Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN.

B. Rumusan Masalah

Mengapa hakim memberikan dasar pertimbangan yang berbeda dalam menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan PKPU antara Putusan Nomor 15/Pdt.Sus – PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 04/Pdt.Sus – PKPU/2018/PN.Niaga.Sby?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penelitian kaidah – kaidah atau norma – norma dalam Hukum Positif. Penelitian ini mengkaji perbedaan atas dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Kepailitan dan PKPU terhadap BUMN.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari Buku – buku yang membahas Kepailitan dan PKPU, Jurnal hukum, dan Pendapat Ahli.

Tenik memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu Studi Kepustakaan dan mengakses *website* dan jurnal – jurnal yang dipublikasi secara *online* yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dalam penelitian normative ini, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara membuat sistematisasi bahan – bahan hukum tertulis. Sistematisasi yang dimaksud adalah membuat klasifikasi terhadap bahan – bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Kemudian hasil dari analisis bahan hukum akan diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi Sistematis dan Gramatikal.

D. Pembahasan

a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Dalam Putusan PKPU Terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines

1. Kasus Posisi Putusan PKPU Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerima surat permohonan PKPU terhadap salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Merpati Nusantara Airlines (Termohon). Termohon adalah Badan Usaha Milik Negara yang

Kepemilikan sahamnya 96.99% dikuasai oleh negara dan 3.01% dikuasai oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk. Permohonan tersebut telah terdaftar pada kepaniteraan tertanggal 17 Februari 2016 dengan Nomor Register 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. permohonan tersebut diajukan oleh Aries Munandar selaku direktur utama PT. Prathita Titian Nusantara (Pemohon).

Bahwa sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 Termohon belum juga melakukan pembayaran utangnya terhadap Pemohon, yang mana total jumlah utang Termohon sudah sebesar Rp. 80.675.511.819,- (delapan puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) dan USD 77,671.31,- (tujuh puluh ribu enam ratus tujuh puluh satu point tiga puluh satu US Dollar).

Berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah memperkirakan bahwa Termohon tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran utangnya, Namun Demikian dalam permohonannya pemohon menyatakan bahwa masih melihat adanya kemungkinan termohon dapat melakukan pembayaran utangnya apabila diberikan tenggang waktu untuk menyelesaikan kewajiban utangnya, sesuai dengan rencana perdamaian yang akan disampaikan oleh Termohon. Selain memiliki Utang terhadap Pemohon, Termohon juga telah terbukti memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan kreditor lain, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT PPA dan PT. Kirana Mitra Mandiri.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengaidlan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan perkara PKPU Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pokok permasalahan dalam Putusan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines adalah mengenai status PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara tersebut termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik atau tidak. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam pertimbangan hakim yang dikarenakan apabila PT. Merpati Nusantara Airlines adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan serta bukti – bukti yang ada, majelis hakim pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat menyimpulkan bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang bergerak dikepentingan publik sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh PT.Prathita Titian Nusantara tidaklah dapat diterima dikarenakan menurut Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang berhak untuk mengajukan PKPU terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di kepentingan publik adalah Kementerian Keuangan.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pada Putusan Nomor 15/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst majelis hakim sebelum membahas hal substansial mengenai permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines. Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PT. Prathita Titian Nusantara dalam mengajukan permohonan. PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Pada Putusan tersebut majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa PT. Merpati Nusantara Airlines adalah Badan Usaha milik Negara. hal itu didasarkan berdasarkan Bukti T-8 dan T-2 yang diajukan oleh termohon mengenai status kepemilikan saham dari PT. Merpati Nusantara Airlines yang mana pada Pasal 4 Anggaran Dasar PT. Merpati Nusantara Airlines menjelaskan bahwa kepemilikan saham dari PT. Merpati Nusantara Airlines 96.99% adalah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 3.01% dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk.

Selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan dengan memperhatikan Bukti T-8 Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan dari PT. Merpati nusantara Airlines yang menjelaskan bahwa PT.

Merpati Nusantara Airlines melakukan usaha dibidang Jasa Angkutan Negara serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan guna menghasilkan barang dan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan sehingga PT. Merpati Nusantara Airlines dapat dikategorikan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik. Hal tersebut mengakibatkan PT. Prathita Titian Nusantara menjadi tidak berwenang untuk mengajukan permohonan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines.

Namun dalam hal ini peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang menilai BUMN yang dapat dipailitkan hanya dengan memenuhi unsur BUMN secara umum, karena pada dasarnya Undang – Undang Kepailitan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) menjelaskan lebih lanjut bahwa BUMN yang permohonan pailit atau PKPU dapat diajukan oleh Kementerian Keuangan hanya BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. secara *argumentum a contrario* berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, maka Permohonan pailit terhadap BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham dapat dilakukan secara langsung oleh kreditornya.⁹⁰

Persero adalah sebagai suatu legal entity, identik dengan PT. yang merupakan pribadi hukum yang mandiri yang secara tegas

⁹⁰Andriani Nurdin, **Keapilittan BUMN Persero Berdasarkan Kepastian Hukum**, PT. Alumni, Bandung,2012,,Hlm. 2

mempunyai keterpisahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dengan masing-masing pribadi pemegang saham ataupun pengurusnya.⁹¹ Sebagai *legal entity*, PT dapat mengajukan permohonan pailit ataupun dimohonkan pailit. Sebagaimana hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UUK dan PKPU, bahwa yang dapat menjadi kreditur ataupun debitur adalah "orang".⁹²

b. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya Dalam Putusan PKPU Terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines

1. Kasus Posisi Putusan PKPU Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Parewa Katering (Pemohon) terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines (Termohon). Adapun setelah beberapa waktu termohon membayar tagihan jasa catering kepada pemohon, pada suatu titik termohon berhenti melakukan pembayaran kepada pemohon yaitu sejak bulan Oktober 2013. Bahwa atas tunggakan pembayaran tersebut termohon telah mengeluarkan surat pengakuan utang No. MNA/DZ/1477/KU.2/2014 tertanggal 9 September 2014.

Berdasarkan uraian diatas pemohon memperkirakan bahwa termohon tidak dapat melanjutkan pembayaran atas kewajibannya terhadap pemohon dan kreditur lainnya, sehingga pemohon

⁹¹ Rahayu Hartini, **BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia**,Setara Press,Malang,2017, Hlm.68

⁹² *Ibid*

mengajukan permohonan PKPU terhadap termohon agar dalam hal ini termohon segera mengajukan rencana perdamaian dengan memperhatikan telah terpenuhinya syarat – syarat diajukannya permohonan PKPU dengan unsur :

3. Termohon tidak dapat melakukan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan daat ditagih ; dan
4. Termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor

Dalam jawabannya termohon juga menyebutkan bahwa termohon tidak membantah atau membenarkan segala dalil atas utang yang disampaikan oleh pemohon dan adapun perincian utang terhadap kreditur lain akan diverivikasi lebih lanjut.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengaidlan Negeri Surabaya dalam Putusan perkara PKPU Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

Pada Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby hakim pengadilan niaga sebelum mempertimbangkan substansi permohonan mempertimbangkan lebih dahulu mengenai keabsahan atau legal standing dari pemohon terlebih dahulu. Pada pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa dalam hal ini termohon bukan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Setelah mencermati hal tersebut dalam Putusannya Majelis hakim melakukan pertimbangan terhadap Utang termohon kepada para

kreditor. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa dalam hal ini termohon memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor oleh karena hal tersebut permohonan pemohon telah memenuhi syarat Pasal 222 Ayat (1) jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Dan dalam amar putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

Pada Putusan perkara Nomor 04/Pdt.sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby majelis hakim dalam pertimbangannya sebelum membahas materi substansial yang diajukan oleh pemohon terlebih dahulu membahas mengenai kedudukan (*Legal Standing*) dari pemohon. Selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa pemohon adalah pihak memiliki kewenangan (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan kepada termohon dikarenakan dalam hal ini Pemohon telah memenuhi Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

Apabila merujuk pada Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya

status kepemilikan modal termohon masih terbagi atas saham yang 96,99% dimiliki oleh Negara dan 3,01% dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, Tbk.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa termohon adalah BUMN perseroan yang bertujuan mengejar keuntungan bukan BUMN yang bertujuan untuk menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum, sehingga dalam hal ini jelas termohon bukanlah BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga permohonan PKPU tidak harus diajukan oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti sependapat terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya yang mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Parewa Katering karena PT. Merpati Nusantara Airlines telah terbukti bukan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU serta telah memenuhi syarat diajukan PKPU yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 Ayat (1) Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

c. Analisis Inkonsistensi hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5)

Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dalam Putusan perkara PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines

2. Analisis Hak mengajukan Permohonan Pailit atau PKPU berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN mengatur secara umum BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang disertakan secara langsung melalui kekayaan yang terpisah.

Undang – Undang Kepailitan dan PKPU mengatur apabila “debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, Permohonan pernyataan pailit hanya diajukan oleh Kementerian Keuangan.” Menurut Undang – Undang Kepailitan dan PKPU, BUMN dapat di pailitkan baik itu berbentuk Persero atau Perum namun apabila debitor adalah BUMN yang memiliki peran strategis dalam kepentingan publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU maka permohonan hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan.⁹³

Sementara bila berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan

⁹³ Mulyadi, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik**, Bandung, Aumni, 2010, Hlm. 80

PKPU dan lebih lanjut dihubungkan dengan Undang – Undang BUMN Pasal 1 angka 4, jelas-jelas bahwa yang dimaksudkan adalah BUMN Perum bukan Persero. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tersebut yang membedakan adalah mengenai modalnya, seluruhnya dimiliki oleh negara dan ”terbagi atas saham” atau ”tidak terbagi atas saham”. Artinya Bila BUMN tersebut modalnya ”tidak terbagi atas saham” dengan kata lain BUMN Perum, maka permohonan kepailitan diajukan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai representasi negara sebagai pemilik modal.⁹⁴

Apabila BUMN tersebut modalnya ”terbagi atas saham”, itu artinya BUMN Persero maka seharusnya menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yaitu permohonan kepailitan boleh diajukan oleh kreditur atau debitur itu sendiri.⁹⁵ dalam Persero, Menteri Keuangan berkedudukan sebagai pemegang saham, sehingga hak dan kewajiban yang ada sama seperti pemegang saham biasa yang lainnya. Kewenangan Menteri Keuangan RI untuk mengajukan pernyataan kepailitan hanya untuk BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Penjelasan Pasal 2 Ayat (5) UUK dan PKPU menyatakan, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan penjelasan diatas apabila ada

⁹⁴Rahayu Hartini, *Op.Cit*, Hlm. 77

⁹⁵*Ibid.*

BUMN Persero telah memenuhi syarat untuk dipailitkan maka bukan merupakan kewenangan atau tidak harus Menteri Keuangan.⁹⁶

3. Analisis Inkonsistensi hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU terhadap Permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara Airlines

Berdasarkan uraian uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat Inkonsistensi hakim dalam memaknai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menolak permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines yang diajukan oleh salah satu kreditornya yaitu PT. Prathita Titian Nusantara. Sementara itu, majelis hakim Pengadilan Niaga Surabaya dalam putusannya mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines yang diajukan oleh salah satu kreditornya yaitu PT. Parewa Katering.

Status PT. Merpati Nusantara berdasarkan Anggaran Dasarnya PT. Nusantara Airlines adalah Persero dan kepemilikan modalnya masih terbagi atas saham.. Dan dengan demikian PT. Merpati Nusantara Airlines memenuhi karakteristik BUMN persero. Terbaginya saham dari PT. Merpati Nusantara Airlines

⁹⁶Andriani Nurdin, *Op.Cit*,Hlm.267

sebagaimana telah dijelaskan diatas menyebabkan tidak terpenuhinya unsur BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi hakim dalam penerapan pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU atas permohonan Kepailitan dan PKPU disebabkan karena kurang cermatnya hakim dalam memaknai BUMN yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Setelah diuraikan diatas peneliti berpendapat bahwa yang dapat mengajukan Kepailitan dan PKPU terhadap PT. Merpati Nusantara Airlines adalah para pihak seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadinya inkonsistensi hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU terhadap permohonan PKPU PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai BUMN, dikarenakan terdapat perbedaan pendapat hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memaknai BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU

beserta penjelasannya. Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Apabila dicermati ketentuan tersebut bersifat kumulatif dikarenakan adanya frasa “dan”, sehingga ketentuan tersebut merujuk kepada BUMN yang berbentuk perum bukan BUMN berbentuk persero yang seluruhnya atau sebagian minimal 51% modalnya dimiliki negara dan kepemilikan terbagi atas saham. Dalam hal ini PT. Merpati Nusantara Airlines adalah BUMN yang berbentuk persero dan kepemilikan sahamnya terbagi atas 96,99% dimiliki negara dan 3,01% dimiliki PT. Garuda Indonesia,Tbk. Oleh karena hal tersebut tidak berlaku ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa permohonan harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sehingga kreditor memiliki kapasitas dalam mengajukan permohonan selama terpenuhinya unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU oleh PT. Merpati Nusantara Airlines.

F. Saran

Adapun saran – saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti sehubungan dengan penelitian ini antara lain :

3. Untuk kedepannya Hakim lebih cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU dengan memperhatikan aspek penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU bahwa ketentuan tersebut merujuk pada BUMN

yang berbentuk perum yang permohonannya hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

4. Dalam waktu dekat ini akan diadakan suatu revisi terhadap Undang – Undang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu peneliti menyarankan untuk dilakukan suatu revisi dengan mempertegas ketentuan Pasal 2 Ayat (5) sehingga tercipta suatu satu pandangan yang sama oleh hakim dalam penerapan Pasal 2 Ayat (5).



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fuady, Munir. **Hukum pailit dalam teori dan praktek** (Bandung : PT. Citra

Aditya Bakti, 2014)

Hartini, Rahayu. **BUMN Persero: Kekayaan Negara dan Hukum Kepailitan**

Indonesia(Malang,Star press,2017)

Mulyadi, **Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

(PKPU) Teori dan Praktik (Bandung, Alumni, 2010)

Nurdin, Andriani. **Keapilittan BUMN Persero Berdasarkan Kepastian Hukum**

(PT. Alumni, Bandung,2012)

Sjahdeini, Sutan Remy. **Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang**

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Jakarta,Grafiti,2009)

Sinaga, Syamsudin M.**Hukum Kepailitan Indoneisa** (Jakarta, PT. Tatanusa,

2012)

Sutedi, Adrian. **Hukum Kepailitan** (Bogor,Ghalia Indonesia,2009)

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 15/Pdt.Sus-

PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan No. 04/Pdt.Sus-

PKPU/2018/PN.Niaga.Sby

JURNAL

Hadjaloka, Loura. Ketidakcermatan Hakim Berujung Pada Disparitas Putusan:

Kajian atas berbagai Putusan Pengadilan Terkait Permohonan Pailit

terhadap Badan Usaha Milik Negara. Jurnal Yudisial, Vol. 9 No.1

